BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 17 Mei 2008
Halaman : 18

Mendesak, Moratorium Jeda Alih Fungsi Hutan

[JAKARTA] Pemerintah didesak segera menerbitkan peraturan dan memberlakukan kebijakan moratorium jeda tebang terhadap hutan-hutan alam dan alih fungsi lahan-lahan gambut di Indonesia secara nasional. Pemberlakuan jeda tebang ini bertujuan untuk menghentikan aksi penghancuran hutan secara tidak bertanggung jawab yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berujung pada terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Penasihat politik Greenpeace Indonesia, Arief Wicaksono, kepada *SP* di Jakarta, Jumat (16/5), mengatakan, kebijakan jeda terbang ini tidak bermaksud menghentikan bisnis kehutanan tetapi digunakan sebagai momen evaluasi terhadap dampak-dampak negatif yang sudah terjadi akibat pembukaan hutan. "Kami usulkan jeda tebang selama lima tahun," kata Arief.

Khusus mengenai persoalan lahan gambut, kata Arief, Greenpeace secara tegas meminta kepada Presiden Indonesia agar menerbitkan instruksi mengenai rencana aksi nasional konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan ekosistem lahan gambut secara berkelanjutan yang bertujuan menurunkan tingkat emisi karbon Indonesia yang disumbang lahan gambut dari 2 miliar ton CO2 menjad kurang dari 500 juta ton CO2 per tahun.

Menurut Arief, hutan tropis yang dimiliki Indonesia memiliki peran sangat penting dalam pengaturan iklim global, namun sayang fungsi penyangga alami ini secara cepat sudah dihancurkan oleh kegiatan industri, pembalakan, dan pembukaan hutan (*deforestasi*) untuk perkebunan dan pertanian khususnya kelapa sawit. "Sekitar 20 persen dari total emisi gas-gas rumah kaca global disebabkan pembukaan hutan, yang kedua baru energi. Di Indonesia sendiri 85 persen emisi gas-gas rumah kaca berasal dari deforestasi. Jadi penghancuran hutan sangat mempengaruhi iklim dunia," tambahnya.

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki 22,5 juta hektar lahan gambut atau setara dengan 83 persen lahan gambut di Asia Tenggara atau 60 persen lahan gambut dunia. Lahan gambut di Asia Tenggara menyimpan sekitar 42 miliar ton karbon di mana sebagian besarnya terdapat di Indonesia.

Saat ini, tambah Arief, sekitar 10 juta hektare hutan di lahan gambut di Indonesia mengalami pengrusakan serius akibat perambahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

Atas fakta di atas, Arief meminta agar rencana pemerintah untuk membuka hutan seluas 20 juta hektar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, segera diurungkan, karena sangat berbahaya bagi lingkungan. "Kita tidak menolak kelapa wasit. Tetapi sebelum membuka lahan baru, pemerintah harus menyelesaikan dulu kasus-kasus lingkungan dan sosial yang muncul akibat masuknya perkebunan sawit," katanya. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup